

## **BAB III**

### **DINAMIKA KONFLIK BERLIAN SIERRA LEONE**

Konflik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran atau kepentingan yang tidak sejalan. Konflik dapat juga timbul karena adanya kesenjangan sosial, kurang meratanya kemamkmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang (Fisher, 2001, p. 4). Terjadinya suatu konflik dapat melibatkan antar individu, individu dan kelompok, maupun antar kelompok.

Dalam permasalahan yang terjadi di Negara Sierra Leone ini, konflik yang terjadi merupakan konflik antar kelompok dimana adanya ketidak puasan yang dirasakan oleh kelompok pemberontak terhadap pemerintah yang dinilai buruk dalam menjalankan sistem pemerintahannya.

#### **A. Profil Negara Sierra Leone**

Republik Sierra Leone adalah sebuah negara yang terletak di Afrika Barat, lebih tepatnya di pesisir Samudera Atlantik. Secara geografis, negara ini berbatasan dengan Guinea di sebelah utara, Liberia di Tenggara dan Samudera Atlantik di sebelah Barat Daya. Negara ini mempunyai luas total 71.740 km<sup>2</sup> dengan wilayah perairannya hanya sekitar 0,2% dari luas totalnya. Sierra Leone terbagi menjadi 12 distrik. Ibu kota sekaligus kota terbesar di Sierra Leone adalah

Freetown. Berdasarkan perkiraan bulan Juli tahun 2010, negara ini berpenduduk 6,4 juta jiwa, dengan kepadatannya berarti sekitar 79,4 jiwa/km<sup>2</sup> (Central Intelligence Agency, 2016). Berikut peta Negara Sierra Leone :

**Gambar 3.1. Peta Sierra Leone**



**Sumber:** (Worldatlas, 2017)

Negara ini memiliki sistem pemerintahan demokrasi konstitusional, dengan Presidennya saat ini bernama Ernest Bai Koroma. Ernest Bai Koroma memenangkan masa jabatan kedua dan terakhir sebagai presiden Sierra Leone pada November 2012, dalam pemilihan pertama yang diadakan negara tanpa pengawasan PBB sejak berakhirnya perang saudara pada tahun 2001 (BBC News, 2017). Pada 27 April 1961, Sierra Leone memperoleh kemerdekaannya dari Inggris. Oleh karena itu, bahasa resmi yang digunakan di negeri ini adalah bahasa Inggris. Sierra Leone memiliki motto "*Unity, Freedom, Justice*".

Sierra Leone dapat dikatakan sebagai salah satu negara tertinggal. Hal ini terlihat dari keadaan penduduknya, dimana sebanyak 41,7% penduduk Sierra Leone masih berumur di bawah 15 tahun (ACAPS, 2014, p. 1). Sierra Leone memiliki tingkat kelahiran yang sangat tinggi, namun ekspektasi hidup yang sangat rendah. Perbandingannya yakni ada 2.000 orang yang meninggal per 100.000 bayi yang lahir (UNICEF, 2007). Perkiraan umur hidup di Sierra Leone hanya mencapai 41 tahun. Negeri ini sering terjangkit penyakit yang salah satu penyebabnya adalah akibat perang sipil yang berkepanjangan.

Pasca perang, Sierra Leone menghadapi berbagai kesulitan salah satunya yaitu kemampuan administrasi yang lemah karena sumber daya manusia yang hilang. Akibatnya, negara mengalami ketidakstabilan dalam mengatasi berbagai persoalan yang kemudian memicu permasalahan-permasalahan lainnya. Permasalahan permasalahan yang terjadi di Sierra Leone ini pun kian melebar karena ada pengaruh dari perkembangan globalisasi yang turut menjadi pengekspor berbagai persoalan lintas batas, baik berupa persoalan positif maupun negatif yang dapat dirasakan bagi wilayah lain di dunia, berikut beberapa persoalan negatif mulai dari global pandemic (HIV/AIDS, Ebola, Flu Burung), kemiskinan, obat bius, organisasi kejahatan dan terorisme (Fukuyama, 2005). Berdasarkan data WHO (*World Health Organization*), penderita di Afrika Barat khususnya Sierra Leone terus meningkat dan menjadi negara dengan jumlah kasus terbanyak. Sierra Leone mencatat sebanyak 7.798 dari 18.000 penderita

Ebola . Hal ini menunjukkan bahwa penyakit mematikan ini menyebar sangat cepat di Sierra Leone (VOA Indonesia, 2014). Persentase pengidap HIV/AIDS di negara ini adalah 1,5% dari populasi. Dapat dikatakan bahwa antara 15 dan 49 orang di Sierra Leone mengidap HIV-positif. Prevalensinya adalah 1,7% untuk wanita dan 1,3% untuk pria (ACAPS, 2014, p. 5).

### **1. Sejarah Negara Sierra Leone**

Sierra Leone merupakan sebuah negara yang relatif kecil di pantai barat Afrika, total 28.000 mil persegi, atau 71.470 kilometer persegi. Perkiraan populasi 1994 menempatkan negara ini pada 4,2 juta orang (53% perempuan, 47% laki-laki) (State University, 2010). Pada awalnya Sierra Leone merupakan wilayah beberapa kerajaan. Wilayah Afrika merupakan daerah yang menjadi bagian jajahan Portugis atas perjanjian Tordesillas. Pelaut Portugis Pedro de Cintra mendarangi wilayah Sierra Leone pada tahun 1462 dan menamai tempat yang dia lihat sebagai Serra Lyoa yang artinya singa atau gunung singa (The Commonwealth, 2004).

Sebagai orang Eropa pertama yang mengunjungi pantai barat Sierra Leone, Portugis menjadi pionir perdagangan antara Eropa dan Afrika Barat. Sierra Leone dan Portugal diperdagangkan dalam barang, misalnya bertukar peralatan dapur untuk gading atau emas. Perdagangan normal ini segera digantikan oleh perdagangan budak

Atlantik (State University, 2010). Pada akhir abad ke-18 Sierra Leone menjadi daerah perbudakan, dimana manusia diperjualbelikan. Pendirian Freetown sebagai basis perbudakan, dimana para budak yang ada di Inggris di pulangkan dan tinggal di wilayah ini. Kebutuhan akan perburuhan di perkebunan Dunia Baru (Amerika) memicu pembelian dan penjualan manusia, dan Sierra Leone menjadi pusat penting dalam perdagangan ini. Namun pada tahun 1807, Inggris mendeklarasikan perdagangan budak ilegal, dan sebuah stasiun angkatan laut Inggris didirikan di Freetown untuk mencegah para budak yang terus beroperasi. Hal ini menjadikan Freetown menjadi koloni Inggris pada tahun 1808 dan daerah pesisir serta pedalaman menjadi protektorat pada tahun 1896 (The Commonwealth, 2004).

Sierra Leone terbagi menjadi Protektorat dan Koloni pada tahun 1924, dengan masing-masing pihak memiliki sistem politik mereka sendiri, dan pada tahun 1947, konflik antara kedua belah pihak memicu langkah untuk menyediakan satu sistem politik tunggal, dan pada tahun 1951 Sir Milton Margai mengawasi penyusunan sebuah Konstitusi baru dan akhirnya mencapai kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1961. Sir Milton Margai terpilih sebagai Perdana Menteri pertama di Sierra Leone dari Partai Rakyat Sierra Leone (SLPP) (Worldatlas, 2017). Setelah kematian Sir Milton yang tak terduga pada tahun 1964, parlemen menunjuk saudara tirinya, Sir Albert Margai sebagai Perdana

Menteri, dan negara tersebut beralih ke era pemerintahan yang semakin otoriter sehingga menjadi awal pemerintahan yang buruk bagi negara tersebut. Pada tahun 1967, Dr Siaka Stevens dari *All People's Congress* (APC) memenangkan pemilu. Stevens hampir ditangkap dalam sebuah kudeta tentara, dikarenakan ketidakpuasan akan sistem pemerintah yang buruk, yang pada akhirnya memberlakukan kekuasaan militer satu tahun (The Commonwealth, 2004). Namun pada tahun 1971, negara ini menjadi republik dengan Stevens sebagai Presiden Eksekutif.

Pemilihan umum yang kembali diadakan pada tahun 1973 diboikot oleh SLPP. Hal ini memudahkan APC untuk kembali memenangkan pemilu pada tahun itu dan juga memudahkan mereka dalam memenangkan pemilu pada tahun 1977 setelah sebuah kampanye yang memicu kekerasan. Pada tahun 1978 negara tersebut menjadi negara satu partai, dipimpin oleh APC yang berkuasa. Pada pemilu pertama tahun 1982, yang diadakan setelah ditetapkannya sistem satu partai, kekerasan pun kembali digunakan dalam pemilihan (The Commonwealth, 2004).

Pada tahun 1985 Mayor Jenderal Joseph Momoh menggantikan Stevens sebagai Presiden. Hal inipun tidak membuat negara Sierra Leone menjadi lebih baik. Menjelang akhir tahun 1980an, kondisi ekonomi negara terus memburuk dan terjadi meningkatnya permintaan

untuk reformasi konstitusi. Pemerintah menanggapi dengan membentuk komisi peninjauan kembali konstitusi. Rekomendasi komisi untuk kembali ke sistem demokrasi multipartai sangat didukung dalam sebuah referendum pada bulan Agustus 1991 (The Commonwealth, 2004).

Tahun 1991, merupakan tahun yang menjadi awal dari konflik perang saudara yang berlangsung selama satu decade. Dimulai dari gagalnya untuk menggulingkan pemerintahan Momoh, hingga munculnya kampanye melawan Presiden yang dilakukan oleh mantan tentara yaitu Kopral Foday Sankoh dan kelompok pemberontak (BBC News, 2017). Berikut urutan peristiwa yang terjadi di negara Sierra Leone:

**Tabel 3.1 Urutan Peristiwa Sierra Leone**

<b>Tahun</b>	<b>Peristiwa</b>
<b>1787</b>	Para ahli abolisionis dan filantropis Inggris mendirikan sebuah pemukiman di Freetown untuk budak yang telah dipulangkan dan diselamatkan
<b>1808</b>	Pemukiman Freetown menjadi koloni mahkota
<b>1896</b>	Inggris membentuk protektorat di daerah pedalaman Freetown
<b>1954</b>	Sir Milton Margai, pemimpin Partai Rakyat Sierra Leone, menunjuk

	menteri utama
<b>1961</b>	Sierra Leone menjadi independen.
<b>1967</b>	Kudeta militer menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Siaka Stevens, namun dia kembali berkuasa tahun berikutnya dan menjadi presiden pada tahun 1971, setelah Sierra Leone menjadi sebuah republik.
<b>1968</b>	Siaka Stevens kembali berkuasa di kepala sebuah pemerintahan sipil menyusul kudeta militer lainnya
<b>1971</b>	Sierra Leone mendeklarasikan sebuah republik, Stevens menjadi presiden eksekutif
<b>1978</b>	Konstitusi baru mengumumkan Sierra Leone sebuah negara satu partai dengan Kongres Rakyat sebagai satu-satunya partai hukum.
<b>1985</b>	Mayjen Joseph Saidu Momoh menjadi presiden setelah pensiun Stevens
<b>1991</b>	Mulai perang saudara. Mantan tentara Kopral Foday Sankoh dan Front Persatuan Revolusionernya (RUF) memulai kampanye melawan Presiden Joseph Saidu Momoh, menangkap kota-kota di perbatasan dengan Liberia.

**Sumber :** (Berbagai Sumber)



## **2. Kondisi Politik Pemerintahan**

Sierra Leone merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi konstitusional. Dimana presiden dipilih melalui pemilihan umum. Presiden terpilih memiliki masa jabatan 5 tahun dan dapat menempati masa jabatannya 2 kali apabila kembali terpilih. Presiden di Sierra Leone berdiri sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sierra Leone memiliki tiga sistem hukum yakni hukum umum, yang didasarkan pada sistem era kolonial Inggris, dikelola melalui sistem peradilan formal yang terdiri dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi dan pengadilan magistrat. Presiden menunjuk, dan Parlemen menyetujui, hakim pengadilan ini (ACAPS, 2014, p. 2).

Kondisi politik pemerintahan negara ini dapat dilihat dari pasca kemerdekaannya. Dimana para politisi mulai menghasut perbedaan etnis yang kemudian menjadi penyumbang utama keruntuhan negara pada tahun 1991 (ACAPS, 2014, p. 3). Sebelum pecahnya perang pada tahun 1991, terjadi konflik teritorial di banyak distrik. Tata pemerintahan yang buruk dan adanya perbedaan kelas yang dikecualikan secara sosial menjadi salah satu pemicu adanya perang. Permasalahan politik partai merupakan hambatan terbesar bagi kohesi dan identitas nasional, karena mereka menciptakan sistem dua partai de

facto yang didominasi oleh Kongres Rakyat Seluruh (APC) dan Partai Rakyat Sierra Leone (SLPP).

Sentralisasi power pada SLPP atau APC, umumnya bernuansakan sentimen antar kelompok etnik meskipun secara keseluruhan sentralisasi ini tetap berfokus pada landasan penggolongan berdasarkan partai politik. Partai Rakyat Sierra Leone (SLPP) mendominasi dari tahun 1950 sampai 1967 (BTI, 2016). Perdana Menteri pertama adalah Mende dan dipilih secara demokratis dengan dukungan kelompok etnik dan elit Krio Pada tahun 1962. Pemerintah ini memolarisasi opini publik di negara tersebut dan meletakkan dasar untuk keterlibatan militer dalam politik. Partai ini berkuasa dari tahun 1950 sampai 1967 dan dari tahun 1996 sampai 2007. Disisi lain APC berakar kuat di wilayah Utara dan di antara kelompok etnis Temne dan Limba. Pada tahun 1967, APC memenangkan pemilihan parlemen namun segera digulingkan oleh sebuah kudeta. Pemimpin APC akhirnya mulai menjabat pada tahun 1968, kemudian pada tahun 1971 melarang semua partai politik lainnya. Pada tahun 1978, sistem satu partai diperkenalkan melalui sebuah konstitusi baru yang mendeklarasikan APC sebagai satu-satunya pihak hukum. Pluralisme politik didirikan kembali melalui sebuah konstitusi baru pada tahun 1991 (The Carter Center, 2012, p. 10). Pada kemenangan pemilihan 2007 dan 2012,

Pemerintah APC Presiden Ernest Bai Koroma dianugerahi beberapa legitimasi demokratis formal.

Pada tahun 1970 hingga 1980 akhir, kondisi Sierra Leone semakin melemah dan kemudian hancur pada tahun 1990-an. Kegagalan negara Sierra Leone juga berasal dari strategi para pemimpin politik yang berusaha untuk melemahkan struktur Negara, pelayanan masyarakat dan institusi agar dapat memonopoli dan mengeksploitasi sumber daya ekonomi. Semua pemerintahan yang pernah berkuasa di Sierra Leone tidak memiliki kesiapan politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan untuk memimpin negaranya. Pada akhirnya hal ini berdampak pada ketidakmampuan mereka untuk menjalankan pemerintahan yang baik sehingga mengakibatkan munculnya kelompok pemberontak dan perang saudara.

Dalam hal ini setiap partai yang berkuasa di Sierra Leone memiliki kecenderungan untuk mempertahankan dominasi kelompoknya dengan cara mengeliminir kelompok politik lainnya. Seringkali sentimen antar kelompok politik ini meluas pada kecenderungan untuk menekan kelompok etnik yang minoritas. Kecepatan dan kemudahan yang dialami oleh Sierra Leone dalam memperoleh kemerdekaan membuat negara ini harus menghadapi tantangan yang besar.

## **B. Berlian sebagai Konflik Utama Negara Sierra Leone**

Permasalahan dalam sektor berlian, baik secara langsung atau tidak langsung telah mencemari konflik di Sierra Leone. Dimana berlian merupakan insentif untuk melakukan kekerasan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh RUF dan tentara pemerintah. Kedua kelompok ini menunjukkan ketertarikan dalam penambangan berlian secara illegal. Pertempuran yang teratur dalam konflik internal ini memang jarang terjadi, namun pertempuran yang terjadi seringkali berlokasi di sekitar wilayah berlian. Ribuan penduduk sipil telah dijauhkan dan diusir dari wilayah yang kaya akan berlian oleh para pemberontak RUF (Satrio, 2008, p. 17).

Kedua, berlian telah membantu dalam hal pembiayaan aksi kekerasan. Kelompok RUF telah menggunakan berlian untuk membeli persenjataan, baik dari tentara pemerintah maupun dari luar negara. Sejumlah pedagang berlian yang ikut memperoleh keuntungan dari aksi kekerasan, juga membantu membiayai aksi pemberontakan RUF (Satrio, 2008, pp. 17-18).

Ketiga, berlian juga telah membantu memperburuk konflik karena telah menimbulkan frustrasi yang diakibatkan oleh keuntungan yang tidak seimbang dari penambangan berlian. Secara historis, keuntungan berlian telah diperoleh lebih banyak oleh pihak luar. Alluvial Diamond Mining Scheme yang dibentuk pada tahun 1955 telah menciptakan kesempatan penambangan legal oleh

penduduk lokal, namun demikian pada prakteknya yang mampu membeli perijinan dan peralatan dasar yang diperlukan adalah para pedagang, polisi setempat, para pejabat dan pegawai sipil. Mereka ini kemudian membagi keuntungan kepada rakyat biasa dengan syarat rakyat biasa berkewajiban untuk menggalinya (Satrio, 2008, p. 18).

Warga Lebanon di Sierra Leone kemudian menggunakan akses superiornya untuk memperoleh modal sehingga dapat mendominasi sektor pertambangan berlian lokal yang baru. Di sisi lain, Siaka Stevens pada saat itu menawarkan kekebalan kepada para pendukung yang loyal pada penggalian berlian illegal. Sementara itu, para pemimpin di wilayah berlian menjadi semakin kaya karena berlian dan memperoleh keuntungan dari kemampuan mereka dalam mengolah perijinan dan menguasai wilayah yang terbaik. Keluarga penguasa pasti mempunyai hak kepemilikan di tanah yang kemudian akan mereka sewakan kepada orang lain berdasarkan keturunan, dimana kepemilikan utama tetap dipegang oleh keluarga penguasa untuk mempertahankan kekuasaan mereka.

Rendahnya pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah dari penambangan berlian juga menjadi pemicu timbulnya konflik internal. Berlian selalu menjadi hal penggoda bagi para penyelundup karena bentuknya yang sangat kecil dan nilainya yang sangat berharga. Cara penyelundupan berlian hingga sampai ke pasar internasional ditentukan oleh kemudahan mereka untuk dibawa keluar dari satu negara ke negara lain secara tersembunyi. Perbatasan

negara yang melintasi batas daratan Afrika Barat sangat lemah dan terisolasi sehingga para penyelundup, imigran dan pedagang dengan mudah dapat menyeberangi perbatasan untuk membawa barang-barang selundupan ke pasar (Satrio, 2008, pp. 18-19).

Pada jalur perlintasan resmi antara Sierra Leone, Guinea dan Liberia, terdapat 60-80 perbatasan yang tidak dijaga melalui semak-semak yang lebat, menyeberangi sungai dan melalui pegunungan, dimana ribuan mil dari daerah perbatasan sangat lemah dalam hal penjagaan sehingga seringkali terjadi penyelundupan berskala besar. Arus berlian selundupan yang keluar dari Afrika Barat sangat sulit untuk dilacak keberadaannya, sehingga komunitas internasional enggan menyalahkan penyelundupan kepada aktor lokal dan regional. Pada tahun 1999, ekspor resmi berlian Liberia hanya 8500 karat, padahal sebenarnya jumlah berlian yang diselundupkan hampir mencapai 80.000 karat. Secara historis, Liberia telah menjadi jalur utama bagi para penyelundup berlian. Liberia memperoleh berlian selundupan dari para penambang gelap di Sierra Leone dan juga dari kelompok pemberontak RUF. Dari Liberia, berlian dapat dijual dengan mudah karena dollar Amerika adalah mata uang resminya dan dalam penjualannya hanya ada sedikit pengawasan dari Tel Aviv dan Antwerp. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara tingkat lokal, regional dan internasional dalam hal penyelundupan berlian (Satrio, 2008, pp. 18-19).

Perdagangan berlian adalah sebuah masalah yang sangat mengkhawatirkan karena adanya pencemaran ekonomi selama berlangsungnya konflik, hal ini dapat dilihat dari akibat keuntungan yang besar dari berlian, rakyat Sierra Leone mengalami terror, pembunuhan dan kemiskinan dalam konflik di Sierra Leone, yang sebagian besar disebabkan oleh berlian. Hal ini semakin memperburuk perekonomian Sierra Leone karena perang internal tersebut, sehingga Sierra Leone tercatat sebagai salah satu negara termiskin di dunia, menurut Bank Dunia (Satrio, 2008, pp. 19-20).

### **C. Dampak Konflik Belian Sierra Leone**

Selama perang sipil yang terjadi 11 tahun di Sierra Leone, telah terjadi berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu yang terjadi adalah penggunaan tentara anak yang dilakukan oleh pihak RUF. Diperkirakan terdapat 10.000 tentara anak yang dimiliki, dan sebagian besar terlibat dalam konflik tersebut. Tentara anak ini umumnya digunakan untuk menyerang desa-desa dan menjaga tambang-tambang berlian dan gudang-gudang persenjataan milik RUF. Tentara anak ini digunakan secara luas oleh RUF, dan RUF melakukan tindakan pencucian otak terhadap anak-anak tersebut yang mengakibatkan mereka menjadi ganas. Ribuan anak-anak diculik dari desa mereka dan dipaksa menjadi tentara dan ada pula yang dijadikan prostitusi. Mereka yang dipilih menjadi tentara tidak jarang dipaksa untuk membunuh orang tua mereka sendiri. Disamping melakukan

tindakan pencucian otak, para tentara anak ini dipaksa untuk mengonsumsi kokain agar mereka tidak memiliki rasa takut.

Selama perang tersebut, anggota-anggota militer RUF yang tertangkap oleh tentara pemerintah langsung dieksekusi mati. RUF sendiri tidak tinggal diam atas tindakan tersebut, para tentara pemerintah yang berhasil ditangkap oleh RUF, dipotong tangannya. Dengan menggunakan parang, para anggota RUF juga memotong anggota tubuh warga sipil Sierra Leone, seperti tangan, lengan, dan juga kaki. Alasan tindakan ini adalah agar mereka tidak mampu lagi melakukan tindakan penambangan dan juga tidak akan mampu membantu pasukan pemerintah, termasuk juga supaya tidak bisa ikut serta dalam pemilihan umum.